

# DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1	PERIODE MOCHTAR KUSUMAATMADJA (1978–1988)	87
<i>Prof. Dr. Susanto Zuhdi</i>		PERIODE ALI ALATAS (1988–1998)	90
<hr/>		CATATAN AKHIR	103
BAB 1 LAHIRNYA ORDE BARU	2	<hr/>	
<i>Dr. Saleh As'ad Djamhari</i>		BAB 5 PEMIKIRAN POLITIK DAN EKONOMI AWAL ORDE BARU	106
DIALOG SOEKARNO-SOEHARTO PASCA-KUDETA G-30-S	3	<i>Kholid Novianto, M.Si.</i>	
OFENSIF DAN KONTRA OFENSIF SOEKARNO-SOEHARTO	8	PERLAWANAN GAGASAN	107
SURAT PERINTAH 11 MARET 1966	15	GAGASAN POLITIK ORDE BARU	115
DE-SOEKARNOISASI	20	PEMIKIRAN DAN GAGASAN EKONOMI ORDE BARU	126
CATATAN AKHIR	26	CATATAN AKHIR	142
<hr/>		<hr/>	
BAB 2 MILITER DAN DWIFUNGSI	28	BAB 6 PEMBANGUNAN EKONOMI: PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN	146
<i>Firdaus Syam, M.A., Ph.D.</i>		<i>Dr. Thee Kian Wie</i>	
TRANSISI POLITIK DARI SOEKARNO KE SOEHARTO	29	PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL	147
DWIFUNGSI ABRI	32	PEMBANGUNAN DAN TRANSFORMASI EKONOMI YANG PESAT	148
RIVALITAS DI SEKITAR SOEHARTO	36	PEMBANGUNAN SOSIAL	152
SOEHARTO, MOERTOPO, SOEMITRO	37	KEBIJAKAN EKONOMI 1967–1997	153
SOEHARTO, MOERDANI, SUDOMO	38	PERIODE ANTARA 1966–1973: STABILISASI, REHABILITASI, DAN PEMULIHAN EKONOMI	153
PENCERAHAN BARU: ABRI "HIJAU"	44	PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI	154
POLA KEPEMIMPINAN MILITER: DARI LOYALITAS INSTITUSI KE KONSTITUSI	47	PERIODE 1974–1981: "BOOM" MINYAK BUMI, INTERVENSI PEMERINTAH YANG LEBIH BESAR DAN PERTUMBUHAN YANG PESAT	156
CATATAN AKHIR	49	KEBIJAKAN PERTANIAN	157
<hr/>		KEBIJAKAN INDUSTRI	158
BAB 3 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN NEGARA	54	PERIODE 1983–1996: ERA PASCA"BOOM" MINYAK BUMI, DEREGULASI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG PESAT	159
<i>Abdul Syukur, M.Hum.</i>		CATATAN AKHIR	163
PEMERINTAH ORDE BARU	55	<hr/>	
RESTRUKTURISASI POLITIK	57	BAB 7 PENDUDUK DAN PERUBAHAN SOSIAL	164
RESTRUKTURISASI SOSIAL	65	<i>Dr. Fadjri Alihar</i>	
KERUSUHAN SITUBONDO	68	DINAMIKA KEPENDUDUKAN DI INDONESIA	165
KERUSUHAN TASIKMALAYA	71	DINAMIKA PENDUDUK DAN ANGKATAN KERJA	168
KESIMPULAN	74	JUMLAH PENDUDUK	168
CATATAN AKHIR	76	ANGKATAN KERJA DAN DINAMIKA PEKERJAAN	170
<hr/>		MIGRASI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL	175
BAB 4 POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MASA ORDE BARU	78	MIGRASI PENDUDUK ANTARPROPINSI	175
<i>Kholid Novianto, M.Si.</i>		MIGRASI PENDUDUK DESA-KOTA	178
POLITIK LUAR NEGERI	79	MIGRASI RISEN	184
PERIODE ADAM MALIK (1966–1978)	80	PENDUDUK DAN DINAMIKA PEMBANGUNAN	185
		PENUTUP	187
		CATATAN AKHIR	189

BAB 8 TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI	190	HEBOH SASTRA	267
<i>Dr. Fadjri Alihar</i>		KEMBALI KE TRADISI	270
MIGRASI TKI SEBELUM KEMERDEKAAN	191	GERAKAN SASTRA HORISON	276
MIGRASI TKI SETELAH KEMERDEKAAN	193	BUDAJA DJAJA DAN DEWAN KESENIAN JAKARTA	279
KARAKTERISTIK TKI	198	GERAKAN SASTRA ETNIK	283
SUMBER INFORMASI DAN PROSES PENYESUAIAN	200	POROS-POROS SASTRA DI BERBAGAI KOTA	286
ISU-ISU KONTEMPORER MASALAH TKI	202	CATATAN AKHIR	290
PENGUNGS TKI	203		
KEKERASAN DI TERMINAL III BANDARA SOEKARNO-HATTA	205	BAB 12 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	298
DUTA SENI	207	<i>Prof. Dr. S. Hamid Hasan</i>	
PENUTUP	209	PERUNDANG-UNDANGAN PENDIDIKAN	299
CATATAN AKHIR	211	ARAH DAN PERKEMBANGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL	308
BAB 9 PENANGANAN KESEHATAN MASA ORDE BARU	212	SEKOLAH, JENJANG PENDIDIKAN, DAN PESERTA DIDIK	313
<i>Dr. Restu Gunawan</i>		PERKEMBANGAN KURIKULUM	316
KESEHATAN KELUARGA	215	CATATAN AKHIR	322
KELUARGA BERENCANA (KB)	219		
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)	223	BAB 13 PENDIDIKAN TINGGI	324
INDUSTRI FARMASI DAN DISTRIBUSI OBAT 226		<i>Prof. Dr. Diana Nomida Musnis - Dr. Umasih</i>	
PENANGANAN PENYAKIT MENULAR	228	PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA	325
CATATAN AKHIR	233	MASA PERKEMBANGAN: UNIVERSITAS DI TIAP PROPINSI	326
		PERGURUAN TINGGI KEDINASAN	328
BAB 10 WACANA GENDER DAN GERAKAN PEREMPUAN	234	KEBIJAKAN DASAR PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI	329
<i>Dr. Siti Fatimah</i>		ENAM IKIP MENJADI UNIVERSITAS	337
PERKEMBANGAN ORGANISASI PEREMPUAN SEBELUM MASA ORDE BARU	235	LEMBAGA-LEMBAGA PEMBERI BEASISWA	338
KONSTRUKSI PEREMPUAN PADA MASA ORDE BARU	238	BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI (DIKTI)	338
BENTUK GERAKAN PEREMPUAN PADA MASA ORDE BARU	242	TIM MANAJEMEN PROGRAM DOKTOR (TMPD)	339
WACANA GENDER DAN REFORMASI	251	BEASISWA FORD FOUNDATION	339
PENUTUP	257	AKTIVITAS MAHASISWA	340
CATATAN AKHIR	258	ISU-ISU PENDIDIKAN TINGGI TERKINI	344
		CATATAN AKHIR	345
BAB 11 SASTRA INDONESIA ZAMAN ORDE BARU	262		
<i>Maman S. Mahayana, M.Hum.</i>		BAB 14 GERAKAN MAHASISWA: MENGONTROL DAN MENGOREKSI NEGARA	346
AWAL KEBANGKITAN KEMBALI SASTRA	263	<i>Indra J. Piliang, M.Si.</i>	
ANGKATAN 66: SEBUAH KONTROVERSI	265	DARI EKSTRA KE INTRA: MASA PASANG PERANAN DEWAN MAHASISWA	347
		PENGELOMPOKAN BARU ORMAS EKSTRA KAMPUS	349

MASA PASANG PERANAN DEWAN MAHASISWA	352	KEBIJAKAN POLITIK	454
PERISTIWA MALARI DAN DAMPAKNYA	354	KEBIJAKSANAAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN	456
IKRAR MAHASISWA 1977 DAN GERAKAN PENOLAKAN		KEBIJAKAN EKONOMI	460
PENCALONAN SOEHARTO	360	ERA PASCA-SOEHARTO	462
PEMBEKUAN DEWAN MAHASISWA DAN		BERBAGAI IDENTITAS SEBELUM PERANG DUNIA II	464
PEMBERLAKUAN NKK/BKK	371	IDENTITAS NASIONAL TIONGHOA:	
PROTES NKK/BKK	374	KELOMPOK SIN PO	466
CATATAN AKHIR	392	IDENTITAS KELOMPOK ETNIK TIONGHOA:	
BAB 15 ISLAM PADA MASA ORDE BARU (1966–1998)	398	CHUNG HWA HUI (CHH)	469
<i>Firdaus Syam, M.A., Ph.D.</i>		IDENTITAS NASIONAL INDONESIA:	
PEMERINTAHAN ORDE BARU	399	PARTAI TIONGHOA INDONESIA (PTI)	470
POLITIK DAN PEMERINTAHAN ORDE BARU	400	IDENTITAS GANDA DI ZAMAN JEPANG	471
PERIODE 1966–1977: KONSOLIDASI DUA KEKUATAN	403	IDENTITAS KELOMPOK ETNIK TIONGHOA SESUDAH PERANG DUNIA II: PERSATUAN TIONGHOA (PT)	472
PERIODE 1977–1985: FRAGMENTASI DAN REFORMULASI	405	CATATAN AKHIR	476
PENGEBIRIAN PARTAI-PARTAI ISLAM	405	BAB 18 PERGUMULAN PUSAT DAN DAERAH: PERGOLAKAN DI PAPUA	478
SATU ASAS BAGI PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI		<i>John Burdam, M.Hum.</i>	
KEMASYARAKATAN	407	PEPERA 1969 DI PAPUA	479
MARJINALISASI PERAN POLITIK UMAT ISLAM	409	HASIL PEPERA DAN IMPLEMENTASINYA	479
KELAHIRAN KELOMPOK PEMBARU DAN		PENYEBAB KERUSUHAN	486
KEBERUNTUNGAN PENGUASA	412	KEPEMIMPINAN, MASYARAKAT, PERGOLAKAN ANTARA	
PERIODE 1985–1998: POLA INTEGRASI SIMBIOSIS	415	PUSAT DAN DAERAH	490
CATATAN AKHIR	418	KEPEMIMPINAN	490
BAB 16 HAJI PADA MASA ORDE BARU	422	MASYARAKAT PAPUA	493
<i>Prof. Dr. H.M. Shaleh Putuhena</i>		PERGOLAKAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH	494
HAJI SEBELUM ORDE BARU	423	HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH	495
KEBIJAKAN PERHAJIAN MASA ORDE BARU	428	KASUS PAPUA	499
PROFIL JEMAAH HAJI	429	PENUTUP	500
TRANSPORTASI JEMAAH HAJI	432	CATATAN AKHIR	501
BERBAGAI MASALAH DI HIJAZ	433	BAB 19 PERGUMULAN PUSAT DAN DAERAH: PERIFERAL GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM)	504
BEBERAPA MUSIBAH	435	<i>M. Isa Sulaiman (alm.)</i>	
MANAJEMEN HAJI	437	GAM (GERAKAN ACEH MERDEKA)	507
MANAJEMEN HAJI DI TANAH AIR	437	CATATAN AKHIR	517
MANAJEMEN HAJI DI HIJAZ	443	BAB 20 TIMOR TIMUR PADA ERA ORDE BARU	520
PPIU DAN KBIH	445	<i>Didik Pradjoko, M.Hum.</i>	
CATATAN AKHIR	448	KEADAAN UMUM TIMOR PORTUGIS 1945–1975	522
BAB 17 PERAN KELOMPOK ETNIK TIONGHOA DAN KEBIJAKAN NEGARA	450	DEKOLONISASI TIMOR PORTUGIS 1974–1975	524
<i>Prof. Dr. Leo Suryadinata</i>		MASA PERANG SAUDARA: AGUSTUS–DESEMBER 1975	527
NEGARA INDONESIA MERDEKA DAN MINORITAS TIONGHOA	453		

OPERASI MILITER LANJUTAN	534	PENUTUP	602
PEMBENTUKAN PROPINSI TIMOR TIMUR	535	CATATAN AKHIR	603
PEMBANGUNAN DI TIMOR TIMUR	536	BAB 23 KONFLIK LOKAL SETELAH KUDETA YANG GAGAL	604
INSIDEN SANTA CRUZ, 12 NOVEMBER 1991	539	<i>Prof. Dr. I Ketut Ardhana</i>	
JEJAK PENDAPAT TAHUN 199: UPAYA MENUJU KEMERDEKAAN	543	KONFLIK LOKAL DAN STRATEGI BANGSA	605
CATATAN AKHIR	548	KRISIS NASIONAL DI TINGKAT LOKAL	610
BAB 21 KONSEP DAN PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	550	CATATAN AKHIR	615
<i>Dr. Saafroedin Bahar</i>		BAB 24 DINAMIKA REFORMASI ABRI	616
KONTEKS KENEGARAAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	554	<i>Dr. Genoveva Ambar Wulan Tulistyowati</i>	
VISI PENDIRI NEGARA HAK ASASI MANUSIA	554	MULTIKRISIS DAN TUNTUTAN PERUBAHAN	617
DUA TANTANGAN BESAR DALAM PROSES PEMBANGUNAN BANGSA DAN PEMBENTUKAN NEGARA DI INDONESIA SEBAGAI KONTEKS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA	555	ABRI DAN PERUBAHAN: REFORMASI GRADUAL, KONSEPTUAL, DAN KONSTITUSIONAL	619
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM ERA PERANG DINGIN	557	PERALIHAN DARI ORDE BARU KE ERA REFORMASI	629
LATAR BELAKANG KOMITMEN KENEGARAAN RI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA	559	CATATAN AKHIR	637
INSTRUMEN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	560	BAB 25 EPILOG: MASA AWAL REFORMASI	640
TEORI TINGKATAN DALAM PERUNDANG- UNDANGAN	560	<i>Prof. Dr. Susanto Zuhdi</i>	
TAP MPR XVII/MPR/ 1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA	561	MASA AKHIR ORDE BARU	642
UU No. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA	561	KRISIS YANG TAK TERKELOLA	647
UUD 1945 AMANDEMEN KE-4 TAHUN 2000	569	BERGULIRNYA REFORMASI	649
UU No. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA	569	PEMERINTAHAN B.J. HABIBIE	649
BERBAGAI UU LAINNYA	575	BEBAN MASA LALU, FONDASI MASA DEPAN BABAK BARU SEJARAH POLITIK	650 656
LEMBAGA-LEMBAGA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA	576	KELUARNYA TIMOR TIMUR DARI NKRI	659
PEMERINTAHAN RI	576	ACEH	660
DPR RI	577	DARI IRIAN MENJADI PAPUA	661
MA DAN JAJARAN LEMBAGA YUDIKATIF DI BAWAHNYA	577	LIMA TAHUN REFORMASI	662
MAHKAMAH KONSTITUSI	577	ANTARA DEMOKRASI DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI	662
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	578	PEMEKARAN WILAYAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	663
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL	580	MASALAH PERBATASAN DAN ISU LINGKUNGAN	665
PERSEORANGAN WARGA NEGARA, TOKOH MASYARAKAT, PARPOL, LSM, PERGURUAN TINGGI, LEMBAGA STUDI, DAN LEMBAGA MASYARAKAT LAINNYA	581	CATATAN AKHIR	667
PENUTUP	582	DAFTAR PUSTAKA	668
CATATAN AKHIR	583		
BAB 22 KEBUDAYAAN PADA MASA ORDE BARU	590		
<i>Drs. Nunus Supardi</i>			
KONGRES KEBUDAYAAN DARI MASA KE MASA	591		
KEBUDAYAAN MASA ORDE BARU	598		